

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENITIPAN BAHAN MENTAH KUE LEBARAN**

**(Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**LOVINTRIA WARISTI GUSTI
NPM : 1721030264**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENITIPAN BAHAN MENTAH KUE LEBARAN**

**(Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**LOVINTRIA WARISTI GUSTI
NPM : 1721030264**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menangani permasalahan judul proposal ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul: “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENITIPAN BAHAN MENTAH KUE LEBARAN (Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**”. maka akan diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil pembatasan (sesudah menyelidiki mempelajari dan sebagainya)¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.²
3. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.³
4. Penitipan adalah penyerahan barang kepada seseorang yang dipercaya dengan syarat barang tersebut akan dikembalikan apabila tujuan penjaminan atas barang tersebut telah selesai dilaksanakan.⁴
5. Bahan adalah barang yang akan diproses menjadi suatu barang atau benda.⁵
6. Mentah adalah belum matang, atau belum bisa untuk di makan.⁶

¹ Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.42.

³ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), Ibid, h.244.

⁴ Ibid, h.219.

⁵ Ibid, h.30.

⁶ Ibid, h.181.

7. Kue adalah kudapan atau makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung, baik tepung terigu, tepung beras, ataupun tepung sagu yang biasanya bercita rasa manis, gurih dan asin.⁷
8. Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat islam, baik hari Raya Idhul Fitri maupun hari Raya Idhul Adha.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENITIPAN BAHAN MENTAH KUE LEBARAN (Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”**. Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penitipan bahan mentah kue lebaran yang dilakukan oleh *owner* pembuat kue lebaran tepatnya di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) 01-2973-1992 kue kering merupakan salah satu jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan berstruktur padat Kue kering merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat luas.⁹

Kue kering adalah kue dengan kadar air yang rendah atau minimal, sehingga dapat tahan lebih lama dari pada kue basah. Kue kering biasanya bertekstur keras tetapi renyah karena dibuat dengan cara di oven. Kue kering memiliki daya tahan yang cukup lama. Kue kering biasanya populer disajikan pada saat perayaan besar seperti hari Raya Idul Fitri atau lebaran.¹⁰

⁷ Ikhfa Aelulu Anisatul Ummah, “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi Program Strata 1 IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018), h.8.

⁸ *Ibid*, h.168.

⁹ Silfia, “Pengaruh Substitusi Tepung Pisang Terhadap Mutu Kue Kering” *Jurnal Litbang Industri*, Vol.2 No.1 (1 Juni 2012), h.43-49.

¹⁰ *Ibid*, h.8.

Menyajikan kue kering pada saat lebaran sudah seperti tradisi turun temurun dari tahun ke tahun, maka dari itu banyak ibu-ibu yang selalu membuat berbagai macam kue lebaran untuk disajikan pada hari raya, baik hari Raya Idul Fitri maupun hari Raya Idhul Adha. Namun dari sekian banyak ibu-ibu yang bersemangat membuat kue lebaran, masih saja ada beberapa ibu-ibu yang malas untuk membuat kue lebaran. Sehingga ibu-ibu tersebut lebih memilih membeli kue lebaran yang sudah jadi atau memilih untuk menitipkan bahan mentah seperti tepung terigu, gula, margarin, tepung beras, tepung tapioka, nanas, coklat, susu dan lain-lain kepada *owner* pembuat kue lebaran.

Owner adalah sebuah kata dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pemilik atau empunya. Yang akan dibahas dalam proposal ini adalah *owner* pembuat kue lebaran.¹¹

Tepatnya di Desa Serdang 1 terdapat satu *owner* pembuat kue lebaran *home made* yang membuat berbagai macam kue kering yang bernama *Holla Cake And Cokies*, contohnya seperti nastar, kue kacang, brownis kering, putri salju, kue babon, kue mentega, ring keju, bola-bola coklat, kembang goyang, *cocho chip*, dan masih banyak lagi. Sistem pemasarannya dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara dengan cara di titipkan ke sebuah toko kue, di iklan kan di media sosial seperti *facebook*, dan yang terakhir adalah dengan sistem *owner* menerima bahan mentah dari kue kering dengan maksud agar menerima upah atau bayaran dari pihak yang menitipkan bahan mentah jika bahan mentah tersebut telah selesai diolah menjadi makanan siap konsumsi berupa kue kering.

Namun dalam praktiknya, *owner* mengambil keuntungan berlipat dari sistem penitipan bahan mentah. Yakni, selain mendapat upah atau bayaran, *owner* masih mengambil sisa bahan dari bahan mentah, atau dengan kata lain *owner* tidak mengembalikan sisa bahan kepada pihak yang menitipkan bahan mentah untuk dibuat kue lebaran.

¹¹ Nicole William dan Budi Djatmiko, "Kamus Saku Bahasa Inggris" *Kamus Inggris - Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2008), h.627.

Hukum Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang tepat dan tidak tepat. Selanjutnya tentu harus melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan dengan pihak yang berkepentingan. Namun dalam praktiknya, sang *owner* tidak menerapkan prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum Islam yang benar. Diantaranya telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran pada surat - surat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa ayat : 29).¹²

Berdasarkan pemaparan di atas maka dianggap perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian karena judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran (Studi Kasus Di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” belum pernah sekali pun dibahas. Maka dari itu penulis akan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan

¹² Ibnu Abidin, Hadyiyah Radd Al-Mukhtar. Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, Dar Al-Fikr, Beirut, 1992, h.312.

ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang maka fokus penelitian dijabarkan pada sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah seorang owner pembuat kue kering di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Masalah pada penelitian ini adalah tidak dikembalikannya sisa bahan mentah kepada pelanggan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman. Sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat terutama bagi umat muslim terhadap teori pembahasan dalam penitipan atau *wadi'ah*. Lebih diperhatikan lagi rukun, syarat, dan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti berapa upah yang dibayarkan, sisa bahan mentah yang akhirnya akan tetap menjadi milik siapa.

- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang sistem penitipan bahan mentah kue Lebaran ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Namun beberapa dari skripsi sebelumnya ada sedikit pembahasan yang mirip untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut;

1. Skripsi Amelia Nurmalasari (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Hewan Kurban” tujuan penelitian ini adalah;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penitipan hewan kurban di Dusun Karang Nongko, Desa Tanjung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penitipan hewan kurban di Dusun Karang Nongko, Desa Tanjung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa penitipan hewan kurban ini ‘*wadi*’

mengeluarkan biaya Rp.200.000.- untuk hewan kurban kambing, sedangkan untuk hewan kurban sapi biaya Rp.400.000,- selama satu bulan. Jika hewan kurban tersebut mati, maka menjadi tanggungjawab penitipan. Didalam praktik ini akadnya bukanlah akad *wadi'ah* akan tetapi akad *ijarah*. Yakni adanya biaya yang dikeluarkan oleh *wadi'*.¹³

4. Skripsi Lely Elvirawati (1995) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak ditempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya” tujuan penelitian ini adalah;
 1. Untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan penitipan anak balita ketintang Surabaya?
 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penitipan anak balita di penitipan anak balita Shandy Putra?

Sumber data yang digali berasal dari penanggungjawab TPA, Ibu balita, perawat balita, dan dokumentasi-dokumentasi. Teknik penggalian data menggunakan Interview, Kuesioner dan dokumenter. Metode analisa data menggunakan metode editing, pengorganisasian data untuk perumusan deskripsi hasil riset. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa tempat penitipan anak Shandy Putra Surabaya memberikan pelayanan pengasuh pengganti sementara kepada para Ibu yang berkarier diluar rumah yang memiliki balita, berdasarkan riset, dalam pelaksanaan penitipan anak balita di TPA Balita Sahandy Putra Surabaya, tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan norma-norma Hukum Islam.¹⁴

3. Skripsi Ahmad Adha (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan”. Tujuan penelitian ini adalah;

¹³ Amelia Nurmalasari, “Tinjauan Hukum Islam Tergadap Penitipan Hewan Kurban”. (Skripsi Prigram Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga Jawa Tengah, 2021).

¹⁴ Lely Elvirawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak di tempat Penitipan Anak Balita Shandy Putra Surabaya” . (Skripsi Program Strata 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 1995).

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa penitipan dicikoromoy?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jasa penitipan mptpr tanpa jaminan dicikoromoy?

Metode yang digunakan adalah *field research*, dengan mewawancarai para pelaku kerjasama, tokoh masyarakat. Pengelola data yang suda terkumpul akan diolah menggunakan metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu menguraikan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya dana parkir yang telah ditetapkan dan harga tarif masuk tersebut dapat membiayai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas umum agar pengunjung merasa aman dan nyaman.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah data yang didapatkan setelah melakukan penelitian lapangan dan teori yang dibahas merupakan teori tentang *wadi'ah* atau penitipan. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah objek, masalah, serta lokasi dilakukannya penelitian. Dan juga belum pernah ada yang membahas secara khusus skripsi penulis yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENITIPAN BAHAN MENTAH KUE LEBARAN.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil oleh sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹⁶

¹⁵ Ahmad Adha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan". (Skripsi Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

¹⁶ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h.2.

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini akan mengamati sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan objek yang diteliti, menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti seperti catatan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada *owner* pembuat kue, dan foto-foto bukti bahwa penulis benar-benar melakukan wawancara.

2. Data dan Sumber Data

Dalam metode penelitian ini peneliti mempunyai penunjang yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti melalui wawancara dan di peroleh dari beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen,

jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder di peroleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah *customer* dari *owner* pembuat kue lebaran di Desa Serdang 1 Tanjung Bintang berjumlah 100 (seratus orang).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁸

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang *owner* pembuat kue lebaran, 10 (sepuluh) orang selaku pelanggan yang menitipkan bahan mentah, jadi sampel dari populasi penelitian ini yaitu berjumlah 11 (sebelas) orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.102.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi tempat penelitian,¹⁹ khususnya yang berhubungan tinjauan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang di kumpulkan bersumber dari dokumen seperti majalah, notulen rapat dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang di teliti.²⁰

Data yang penulis cari dengan dokumentasi ini adalah data tentang teori hukum Islam yang penulis temukan dilapangan selama penelitian dilakukan.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka, mendengar secara langsung keterangan-keterangan atau informasi yang berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat yang akan penulis ajukan kepada *owner* yaitu:

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h.85.

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), hal. 178.

- a. Bagaimana cara *owner* untuk menarik minat para pelanggan agar bersedia menitipkan bahan mentah kue lebaran?
 - b. Apakah ada akad atau perjanjian antara *owner* dan pelanggan, bahwa *owner* akan mendapatkan upah misal Rp.50.000 setelah menyelesaikan pembuatan kue lebaran sebanyak 3 kg, dan bahan mentah yang tersisa tersebut tidak perlu dikembalikan kepada pelanggan?
 - c. Sudah berapa lama bisnis kue kering ini berjalan?
 - d. Apakah bahan mentah yang tersisa itu bisa digunakan untuk membuat kue kering?
 - e. Apa alasan ibu untuk tidak mengembalikan bahan mentah yang tersisa?
 - f. Apakah ada perjanjian pada saat menitipkan bahan mentah kepada *owner*? Contohnya seperti; jika bahan mentah ini masih memiliki sisa, maka akan tetap menjadi milik pelanggan. Atau akan menjadi milik *owner*?
 - g. Berapa macam kue kering yang biasa *owner* buat?
5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tidak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari *editing* tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada data,

sehingga dengan adanya *editing* maka kesalahan atau kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.²¹

b. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau pokok bahasan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²²

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue lebaran di desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif . kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta metode pemikiran induktif yaitu mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan hasil yang ada dilapangan mengenai fenomena yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari tiga bagian:

Pertama bagian formalitas terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi.

Kedua bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai rangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab-bab selanjutnya.

²¹ *Ibid*, h.22.

²² *Ibid*, h.3.

Bab II berisi tentang landasan teori yang terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama berkaitan dengan akad, yang mencakup pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad. Sedangkan untuk penjelasan *wadi'ah* yaitu, pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, jenis-jenis *wadi'ah*, pendapat ulama tentang *wadi'ah*, kewajiban menerima dan menjaga *wadi'ah*, dan status *wadi'ah*.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum lokasi penelitian di Desa serdang¹ Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pratik penitipan bahan mentah kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Sub bab gambaran umum lokasi penelitian di Desa serdang¹ Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, batas wilayah desa Serdang, kondisi geografis, jumlah dusun dan alasan *owner* pembuat kue kering membuka usaha.

Bab IV berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab yakni, pratik penitipan bahan mentah kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pandangan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian *ketiga* dalam penulisan skripsi ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al 'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.²³ “Perkataan *al – ‘aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.”²⁴

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan²⁵, akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya “...mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak...”²⁶ Mempunyai makna tali yang memikat kedua pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu:

- a. Secara khusus akad adalah *ijab dan qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap obyek akad (*ma-aqud’alaih*), *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah “...pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*”.²⁷ Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan

²³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

²⁴ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

²⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.

²⁶ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2016), h.180.

²⁷ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 76-77.

diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah *ijab* disebut *qabil*.²⁸ Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti *ijab* dan *qabul* atau serah terima barang atau obyek dalam bermuamalah.²⁹

- b. Secara umum akad adalah “setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak, atau juga bisa diartikan bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian...”³⁰⁴¹ Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).³¹ “Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad berarti berkaitan dengan *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang”³²

Dalam istilah fiqh, “akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai”.³³ Sedangkan menurut para ahli seperti Muhammad Aziz Hakim, akad yaitu gabungan atau pernyataan dari penawaran dan penerimaan yang sah

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 63.

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari’ah* (Jakarta: GaneshaPress, 2000), h. 154.

³¹ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2016), h.180.

³² Oni Sahrani, M hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.

sesuai dengan hukum Islam”.³⁴ Menurut Zainal Abdulhaq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.³⁵

Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *muawadhah* lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.

2. Dasar Hukum Akad

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firmamn Allah Swt. QS. Al-Maai'idah (5) ayat (1):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَّا تَعْمَ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-nya”.³⁶

Dasar hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah swt.

QS. Ali -,Imran (3) ayat (76):

بَلٰى مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ ۖ وَاتَّقٰۤى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan

³⁴ Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h. 192.

³⁵ Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.76

³⁶ *Ibid*,

bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.³⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun Allah Swt. harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

3. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut pengertian *fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh “dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan atijam yang mewujudkan oleh akad”,³⁸ rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

1) *Aqid*

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang

³⁷ *Ibid*,

³⁸ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.

merupakan wakil dari yang memiliki haq. ³⁹

2) *Ma'qud "Aliah*

Ma'qud "aliah ialah “setiap benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah”. Di antara syaratnya ialah:⁴⁰

- (1) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak menjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- (2) Objek akad termaksud barang yang diperbolehkan.
- (3) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.
- (4) Objek akad dapat diserahkan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

3) *Maudhu' al'Aqd*

Maudhu' al'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah: “memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *ijarah* adalah memberikan manfaat

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47.

⁴⁰ *Ibid*,

dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti”.⁴¹

4) *Sighat al'Aqd*

Sighat al'Aqd yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah “ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad”, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁴²

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:⁴³

- (1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- (2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- (3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- (4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari “pihak-pihak yang bersangkutan, tidak

⁴¹ *Ibid*,

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

⁴³ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h.30.

terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takuti-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqih dalam berakad, yaitu:⁴⁴

- (1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya makai *ijab qabul* boleh dengan kitabah atau tulisan.
- (2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, “misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat”.
- (3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- (4) Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada *akad ida'* (titipan).

b. Syarat akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentukan terjadi sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan.⁴⁵

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.34.

syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:⁴⁶

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:
 - (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
 - (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - (3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - (4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamamh* (saling merasakan).
 - (5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - (6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang yang ber*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* maka batalah *ijabnya*.
 - (7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, “sehingga bila seseorang yang ber*ijab* telah berpisah telah berpisah sebelum

⁴⁶ *Ibid*,

adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal”.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:⁴⁷

- (1) Syarat *ta'liqiyah* adalah yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
- (2) Syarat *taqyid* adalah “syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak”. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.
- (3) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menangguhkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak, di antaranya yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad

Dalam hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:⁴⁸

- (1) Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan *tamyiz* dan berbilang.
- (2) Shighat akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuain *ijab* dan *qabulnya* dilakukan dalam suatu majlis akad.
- (3) Objek akad dapat diserahkan, “dapat

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ *Ibid*,

ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki)” jika ada ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di laut maka akadnya tidak sah.

(4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam.

b) Syarat keabsahan akad

Syarat keabsahan akad adalah “syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi”. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:⁴⁹

(1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.

(2) Pernyataan akad tidak menimbulkan *mudharat*.

(3) Bebas dari *gharar* (tipuan).

c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut annafadz*)

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat itu adalah:⁵⁰

(1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad.

(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ *Ibid*,

d) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*)

“Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan *khiyar*”.⁵¹

4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:⁵²

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggangwaktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnyatidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhirjika:
 - a) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-*

⁵¹ *Ibid*,

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang:Pustaka Rizki, 2009), h. 95.

muzara'ah.

“Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirinya akad terdapat dua macam sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan *infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadnya yang secara terus menerus masih berlaku, seperti akad sewa menyewa dan akad pinjam meminjam, apabila benda-benda yang dipinjamkan atau yang disewakan itu hilang atau tidak ada lagi maka akad dapat lepas dengan sendirinya”.⁵³ Sedangkan akad yang mengikat seperti akad gadai (*rahn*), maka dapat dilepaskan ikatan akadnya dengan kehendak orang yang memegang gadai (*murtahin*), tidak bisa dilepaskan ikatan akadnya atas kehendak *rahin*.⁵⁴

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁵⁵

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masatenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnyamengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
 - a) Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syaratyang tidak terpenuhi.

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ *Ibid*,

- b) Berlakunya khiyar *syarat*, *aib*, dan *rukyyah*.
- c) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak
- d) Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

B. Wadi'ah

1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi *wadi'ah* (ودعة) berarti titipan (amanah). Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a-yada'u-wad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.⁵⁶

Secara harfiah, *wadi'ah* dapat diartikan dengan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda mendefinisikan, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

Secara terminologi *wadi'ah* menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh :

1. Ulama Hanafiyah

“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)”.

2. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambilah (Jumhur Ulama)

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

3. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan giro adalah simpanan

⁵⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h.145.

berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁵⁷ “Akad *Wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Dalam suatu perjanjian yang bersifat riil, timbulnya hubungan hukum setelah dilakukannya perbuatan yang riil atau nyata, dalam hal penitipan barang ini tentunya perbuatan riil tersebut dilaksanakan dalam bentuk “menyerahkan suatu barang”. Dengan sendirinya walaupun perjanjian penitipan barang sudah diadakan, akan tetapi tidak diikuti dengan tindakan penyerahan barang yang dititipkan, maka hukum tidak terjadi.⁵⁸

Dasar hukum penitipan barang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِصَّةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang

⁵⁷ *Ibid*, h.67

⁵⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.69

dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhan Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat”. (QS. An-Nisa : 58).⁵⁹

b. Hadist

Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ صُضِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدُّ أَلَا مَا نَتَّ إِلَىٰ مَنِ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan

⁵⁹ *Ibid*,

Abu Daud dan ia menghasankannya, dan hadist ini juga dishahihkan oleh Hakim).⁶⁰

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* ada empat; Barang yang dititipkan (*wadi'ah*), Orang yang menitipkan (*mudi' atau muwaddi'*), Orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*), Ijab qabul (*sighat*).⁶¹

Sedangkan syarat-syarat al-wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang sudah di sebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang dititipkan, dan syarat orang yang menerima titipan.

a. Syarat benda yang dititipkan

Menurut Hanafiyah benda yang di titipkan harus benda yang dapat di simpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan seperti burung di udara atau benda yang jatuh di dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti.

Sedangkan, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang memiliki nilai (*qimah*) dan di pandang sebagai *mal* walaupun najis. Seperti anjing yang bisa di manfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka *wadi'ah* tidak sah.⁶²

b. Orang yang menitipkan (*mudi' atau muwaddi'*) dan Orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*)

Dua orang yang berakad diisyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun dia belum baligh, maka tidak

⁶⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet, IV, 1960, h.68

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Hamzah, 2010), h.459

⁶² Wahbah Az-Zuhailly, *op.cit.*, h.39

sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila.⁶³ Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak di isyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan dagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang *dihajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, apa yang diisyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang diisyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.

c. *Syarat Sighat*

Sighat adalah akad ijab dan qabul. Syarat *sighat* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa ucapan dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas (*sharih*) “Saya titipkan barang ini Kepada Anda”. Sedangkan lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan “Berikan mobil ini KepadaKu” pemilik mobil menjawab “Saya berikan mobil ini Kepada Anda”. Kata “Berikan” mengandung kata *hibah* dan *wadi'ah*. dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan orang lain tanpa mengatakan apapun, perbuatan tersebut merupakan titipan (*wadi'ah*). demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*) seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

⁶³ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6, (Beirut: al-Kutub al-ilmiah, t.t.), h.299, Pasal.776

4. Jenis-Jenis Wadi'ah

Dalam Islam mengenai titipan atau *wadi'ah* dapat di bedakan menjadi dua, yaitu;

a. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya akad penitipan barang atau pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Tetapi orang yang di titipi barang (*wadi'*) tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang dari yang dititipi selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan, (karena sebab-sebab diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW;

لا يتم طلب ضمانات المسؤن وليتخذ ام (القروض) ومتلقي
الودائع غير الممهلين

Artinya ; “Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai”⁶⁴

Maksud dari pemaparan di atas penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan untuk kepentingan pribadi sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak penerima titipan dapat meminta biaya pemeliharaan barang karena sudah menjaga barang dari kerusakan yang disengaja maupun tidak sengaja. Penerima titipan berhak meminta imbalan atas jasa menjaga barang.

b. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

Titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diizinkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dapat diberikan sebagian kepada pihak

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.43

yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian penerima titipan harus bertanggungjawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

Karakteristik *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* diantaranya adalah;

- a. Harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
 - b. Karena dimanfaatkan, harta yang dimanfaatkan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi si penerima titipan untuk memberikan hasil kepada si penitip.⁶⁵
 - c. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen lembaga keuangan syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan.
5. Pendapat Ulama Tentang *Wadi'ah*

Dalam pembahasan *wadi'ah* ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang *wadi'ah*, baik dari segi definisi, hukum menerima *wadi'ah*, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang lain yang senilai.

Pembahasan *wadi'ah* dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Tentang Pengertian *Wadi'ah*

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik

⁶⁵ Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT ELEX Media Computindo, 2009), h.460

dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun dengan isyarat.⁶⁶

b. Tentang Hukum Menerima *Wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaan.⁶⁷

Sebagian ulama berpendapat tentang wajib menerima *wadi'ah*, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggungjawab pemiliknya.

c. Tata Cara Memelihara Barang Titipan

1. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggungjawab yang dititipi.⁶⁸
2. Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggungjawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangganya.⁶⁹
3. Ulama Mazhab Hanafi, *wadi'ah* juga menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama dengannya orang yang dititipi, seperti mitra dengannya.⁷⁰

d. Tentang Pemakaian Barang Titipan

⁶⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi* (Yogyakarta: UII Pers, 2002), h.21

⁶⁷ *Ibid*,

⁶⁸ *Ibid*,

⁶⁹ *Ibid*,

⁷⁰ *Ibid*,

1. Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan ada imbalan jika mengembalikan seperti itu.⁷¹
 2. Menurut Imam Abu Hanifah, bila menerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu diberi imbalan, tetapi jika ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakainya.⁷²
- e. Tentang Pengambilan Keuntungan Dari Barang Titipan
1. Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf, dan segolongan fuqaha menetapkan bahwa keuntungan itu halal baginya. Meskipun ia melakukan *ghasab* kepada barang tersebut.
 2. Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad bin Al-Hasan, menetapkan bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkan.⁷³
 3. Segolongan fuqaha menetapkan pokok harta serta segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang diminta untuk memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.⁷⁴
- f. Tentang Pengembalian Barang Yang Senilai
1. Imam Malik berpendapat tanggungan tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai.⁷⁵
 2. Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia tidak harus

⁷¹ *Ibid*,

⁷² Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 2004), h.256

⁷³ *Ibid*,

⁷⁴ *Ibid*, h.257

⁷⁵ *Ibid*

mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.⁷⁶

3. Bagi fuqaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan, bagi fuqaha yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.⁷⁷

6. Status *Wadi'ah*

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor (*taqshir*). Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرُ الْمَغْلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُتَسَوِّدِ غَيْرُ الْمَغْلِ ضَمَانٌ

Artinya ; “Tidak ada ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak menyelewengkan dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak melakukan penyelewengan”. (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).⁷⁸

Dalam hadist lain yang juga diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ *Ibid*,

⁷⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t., h.37

Artinya ; “Tidak ada ganti rugi bagi pemegang amanah”. (HR.Ad-Daruquthni).⁷⁹

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya ; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”(An-Nisa (4) ayat 58).⁸⁰

Penyerahan titipan tersebut harus langsung kepada pemilik barang, bukan kepada orang lain, meskipun ia keluarganya. Hal ini berbeda dengan pinjaman (*‘ariyah*) dan *ijarah*, yang pengembaliannya boleh kepada anggota keluarga si pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, untuk barang-barang yang berharga, seperti emas dan permata, pengembaliannya harus langsung kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut dikembalikan kepada anggota keluarga kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.

7. Perubahan Dari Amanah Kepada Tanggungan (*Dhaman*)

⁷⁹ *Ibid*,

⁸⁰ Ibnu Abidin, Hadyiyah Radd Al-Mukhtar. Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, Dar Al-Fikr, Beirut, 1992, h.328.

Status titipan dapat berubah dari amanah kepada tanggungan (*dhaman*) karena beberapa hal sebagai berikut:⁸¹

- a. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dengan terjadinya akad *wadi'ah*, maka ia terikat untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Apabila ia melihat ada orang yang mencuri barang titipan (*wadi'ah*), padahal ia mampu untuk mencegahnya, tetapi ia diam saja maka ia wajib menggantinya.
- b. Orang yang dititipi tanpa *udzur* menitipkan barang titipannya kepada orang lain yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya. Dalam hal ini ia (*wadi*) statusnya berubah menjadi *dhamin* (penanggung) karena orang yang menitipkan setuju (*rela*) menitipkan barangnya kepadanya, tetapi tidak kepada orang lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut dilakukan karena *udzur*, misalnya terjadi kebakaran dirumahnya, dan ia menyerahkan barang titipan tersebut kepada orang lain maka dalam hal ini ia tidak wajib mengganti kerugian.
- c. Orang yang dititipi menggunakan barang titipan (*wadi'ah*). Misalnya kendaraan titipan oleh *wadi*, kemudian terjadi kerusakan maka ia wajib mengganti kerugian.
- d. Barang titipan dibawa bepergian. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila terjadi kerusakan atau hilang maka *wadi* wajib mengganti, karena perjalanan rawan kehilangan, baik jalannya aman maupun tidak. Abu Hanifah membolehkan orang yang dititipi (*wadi*) membawa barang titipan, apabila jalannya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang, misalnya karena akad *wadi'ah* mutlak.⁸²

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Amzah, 2017), h.463.

⁸² *Ibid*,

- e. Mengingkari *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkannya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya, atau ia menahannya padahal ia mampu menyerahkannya maka ia wajib mengganti kerugian.
- f. Bercampurnya *wadi'ah* dengan barang lainnya. Apabila orang yang dititipi (*wadi*) mencampur barang titipannya dengan hartanya sendiri maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila barang titipan bisa dipisahkan dari hartanya maka hal itu tidak menjadi masalah. Kemungkinan kedua, apabila barang titipan tidak bisa dipisahkan dari harta orang yang dititipi maka menurut jumhur ulama termasuk Abu Hanifah, ia wajib mengganti barang yang sepadan (*mitsli*). Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, pemilik boleh *khiyar* (memilih). Pertama, ia boleh meminta ganti kerugian dengan barang yang sepadan (*mitsli*). Kedua, ia boleh mengambil separuh dari barang yang dicampur, atau kedua pemilik menjualnya dan hasil penjualan dibagi.⁸³
- g. Penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang menitipkan (*mudi*) dalam menjaga *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan (*mudi*) mensyaratkan kepada orang yang dititipi (*wadi*) agar menjaga *wadi'ah* di tempat tertentu, seperti rumah atau toko, kemudian ia (*wadi*) memindahkannya ke tempat yang lain tanpa adanya *udzur*, maka para ulama berbeda pendapat:
 - a) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, apabila pemindahannya ke tempat atau rumah yang sama amannya dengan rumah pertama atau bahkan lebih maka orang yang dititipi tidak dikarenakan ganti rugi.⁸⁴

⁸³ *Ibid*,

⁸⁴ *Ibid*,

- b) Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama Hanabilah, orang dititipi dikarenakan ganti rugi, baik tempat pemindahannya sama amannya atau di bawah atau di atas dibandingkan dengan tempat pertama. Alannya, karena ia (*wadi*) telah melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik barang tanpa faedah dan maslahat.⁸⁵

Demikian beberapa uraian tentang *wadi'ah* yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, statusnya apakah *wadi'ah* itu amanah atau *dhaman*, dan hal-hal yang menyebabkan perubahan dari amanah kepada *dhaman*.

C. Pengertian Ijarah Dan Dasar Hukumnya

1. PENGERTIAN SEWA-MENYEWA (*IJARAH*)

Sewa-menyewa atau bahasa arab *ijarah* berasal dari kata أَجَرَ yang sinonimnya :

- أَلْأَرَى Yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat أَجَرَ الشَّيْءَ (*menyewakan sesuatu*).
- أَعْطَا أَجْرًا Yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat : أَجَرَ قُلَانًا عَلَيَّ (*ia memberikan kepada si fulan upah sekian*).
- أَنْأَبَةً Yang artinya memberinya pahala, seperti dalam kalimat اللهُ عَبْدَهُ أَجَرَ (*Allah memberikan pahala kepada hamba-nya*).⁸⁶

Ali Fikri mengertikan *ijarah* menurut bahasa dengan: اللَّرَاءُ أَوْبِيحُ النَّفْعَتِ yang artinya: sewa-menyewa atau jual beli menfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan :

الإِجَارَةُ مَشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوْضُ وَمِنْهُ سَمِيَالثَوَابُ أَجْرًا

Artinya : *Ijarah* diambil dari kata “Al_Ajr” yang arinya ‘iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (ipah/pahala).⁸⁷

⁸⁵ Ibid,

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Amzah 2017), h.315

⁸⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Dar Al-Fikr : Beirut 1981), h.198

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengertikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp3.000.000.,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya. *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda. Karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapu untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.

2. DASAR HUKUM *IJARAH*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashir, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyid bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah

a. QS. Ath. Thalaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتَرْضِعْ لَهُ أٌخْرَى ۖ

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikan kepada mereka upahnya.

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٦﴾
﴿٢٧﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Yaa bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya”.

Berkatalah dia (Syu'aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka ini adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termaksud orang-orang yang baik”.⁸⁸

Di samping Al-qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.

3. RUKUN DAN SYARAT IJARAH

1. Rukun Ijarah

Menurut Hanafah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah* (arab), *isti'jar* (arab), *iktira* (arab), dan *ikra* (arab).

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu

- a. *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewa) dan *musta'jir* (orang yang menyewa);
- b. *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

⁸⁸ *Ibid*,

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁸⁹

2. Syarat-Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menurut izin walinya.⁹⁰

b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad),

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (*wilayah*), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁹¹

c. Syarat sahnya akad

⁸⁹ Ibid,

⁹⁰ Ibid, Juz 4. h.18.

⁹¹ Ibid, Juz 4. h.20.

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'aliah* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا
إِنْ تَكُونِ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Ijarah termasuk kepada perniagaan (*ijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.⁹²

- 2) Objek akad yaitu manfaat harta jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan :

- a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang

⁹² Wahbah Zuhaili, Juz 4, h.736.

disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam gambar atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas .

3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumbuh *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena

manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.⁹³

- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.⁹⁴
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqarruh dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Alquran, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, ulama *mutaakhkhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama. Mereka menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Alquran dan ilmu-ilmu agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama.⁹⁵

⁹³ Sayid Sabiq, Op.cit, Juz 3, h.200.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

Malikayah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah untuk mengajarkan Alquran hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu. Disamping mengajarkan Alquran, malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus mamsjid, tidak untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi'iyah membolehkan *ijarah* untuk haji, sesuai dengan perintah Rasulullah kepada salah seorang sahabat untuk melakukan haji bagi orang lain. Syafi'iyah juga membolehkan ijarah untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan, dan menguburkannya. Abu Hanifah tidak membolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, tetapi ia membolehkan ijarah untuk menggali kubur dan memikul jenazah. Para ulama sepakat membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan ilmu hisab (matematika), khath, lughah (bahasa), adab (sastra), figh, dan hadis serta membangun masjid dan madrasah.⁹⁶

- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- 7) manfaat *m'aqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini ijarah tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atas sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (Syarat Luzum)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:⁹⁸

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatannya atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkan. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh,

⁹⁸ *Ibid*, h.753-755.

kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal) karena *ma'aqud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

- 2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah* mislanya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanfiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

- i. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- ii. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁹⁹

Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini hukumnya boleh

⁹⁹ *Ibid*,

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh bentuknya boleh.¹⁰⁰

5. HUKUM IJARAH ATAS PEKERJAAN (UPAH-MENGUPAH)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *Ijarah* untuk melakukan sebuah perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, kulkas atau lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua yaitu :

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini dia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya; seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarik*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang menjahit, notaris, dan pengacara.

Hukumnya adalah ia (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja pada orang lain, ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali ia bekerja.¹⁰¹

¹⁰⁰ Nasrun Haroen, Op.cit.,h.26

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, Op.cit.,h.333.



BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran *Holla Cake And Cokies* di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

a. Batas Wilayah Desa Serdang

Utara : Desa Jati Indah

Timur : Desa Jatibaru

Selatan : Desa Sinar Ogan

Barat : Desa Sukanegara

b. Kondisi Geografis

Ketinggian Tanah : 30 M dari permukaan laut

Curah Hujan : 2.500-3.000 MM/TH

Suhu : 25-30 C

Luas : 693 Ha

c. Jumlah Dusun

Dusun di Desa Serdang berjumlah 12 (dua belas);

1. Dusun 1A

7. Dusun 4A

2. Dusun 1B

8. Dusun 4B

3. Dusun 2A

9. Dusun Karang Asem

4. Dusun 2B

10. Dusun Griya Industri

5. Dusun 3A

11. Dusun Griya Sejahtera

6. Dusun 3B

12. Dusun Mekar Jaya

d. Alasan *Owner* Membuka Usaha

Semakin banyaknya kemajuan dikehidupan manusia, semakin banyak pula kesibukan, pekerjaan, dan keinginan manusia. Salah satunya adalah sesuatu yang serba instan dan praktis. Karena sangat banyaknya keinginan orang-orang untuk hidup dengan praktis, banyak pula ide-ide yang muncul dari beberapa orang untuk membuka usaha, entah itu mencuci pakaian atau *laundry*, pembuat keripik, pembuat kerupuk, dan pembuat kue-kue kering untuk lebaran.

Owner pembuat kue lebaran *Holla Cake And Cokies* adalah salah satunya. *Owner Holla Cake And Cokies* membuka usaha *home made* ini dari beberapa tahun yang lalu,

ia melihat celah dari sekian banyak orang yang beliau kenal, rata-rata adalah tipe orang yang ingin hidup serba praktis. Baju-baju mereka *laundry*, pekerjaan rumah mereka memilih untuk menyewa asisten rumah tangga, bahkan makan sekalipun mereka memilih untuk membeli dari pada memasak sendiri. Karena *owner Holla Cake And Cokies* ini memiliki kemampuan membuat kue kering dan basah yang bisa dikatakan lebih dari cukup, maka dari situlah ide untuk membuka usaha *home made* ini berjalan. Awal mulanya hanya beberapa orang yang mengetahui bahwa *owner* pembuat kue lebaran ini membuka usaha, lama kelamaan banyak orang yang mengetahui melalui promosi yang dilakukan *owner* melalui *social media facebook*, dan dari mulut ke mulut para pelanggan. Lebih tepatnya usaha *home made* ini berada di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dengan pelanggan dari berbagai desa yang ada disekitar Tanjung Bintang

Adapun alasan yang membuat usaha *home made* yang dibuka oleh *owner* pembuat kue kering ini menarik adalah sistemnya yang berbeda, rata-rata *owner* pembuat kue kering langsung membuat kue kering seperti nastar, kue mentaga, kue bangkit, kue kacang, dan sebagainya, lalu setelah itu langsung diperjualbelikan. Namun, *owner* pembuat kue kering ini menerima bahan mentah seperti tepung terigu, gula, telur, keju, wisman, mentega, dan lain sebagainya untuk diolah menjadi kue kering siap konsumsi dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000-. setiap 3 kg kue kering yang *owner* buat, dan dinilai para pelanggan cukup murah.

B. Praktik Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Bahan mentah adalah bahan baku yang belum mengalami pengolahan sehingga belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁰²

Kue kering adalah kue dengan kadar air yang rendah atau minimal, sehingga dapat tahan lebih lama dari pada kue basah. Kue kering biasanya bertekstur keras tetapi renyah karena dibuat dengan cara di oven. Kue kering memiliki daya tahan yang cukup lama. Kue kering biasanya populer disajikan pada saat perayaan besar seperti hari Raya Idul Fitri atau lebaran.¹⁰³

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melihat bagaimana praktik seorang *owner* kue lebaran yang mengambil keuntungan berlipat dari bahan mentah sisa yang dititipkan oleh pelanggan kepada *owner* tanpa meminta izin terlebih dahulu pada studi kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ibu Ajeng selaku *owner* pembuat kue kering, penulis mendapat penjelasan sebagai berikut:

“Saya sudah menjalankan bisnis ini dari bertahun-tahun lalu, lebih tepatnya 5 tahun lalu, jadi pelanggan yang menitipkan bahan mentah kepada saya sudah sangat banyak. Saya tidak perlu lagi menawarkan kepada ibu-ibu untuk menitipkan bahan mentah kepada saya, saya cukup upload hasil kue kering yang saya buat di facebook dan dengan sendirinya pelanggan datang. Untuk bahan mentah milik pelanggan pasti masih memiliki sisa, dan bahan sisa tersebut bisa saya buat menjadi kue kering dalam bentuk lain bila saya tambahkan sedikit bahan yang saya punya. Setelah kue kering itu jadi, saya bisa menjualnya kembali. Selanjutnya untuk alasan saya tidak mengembalikan bahan mentah sisa tersebut, karena saya menganggap bahan mentah itu adalah tambahan untuk saya. Karena tambahan bahan mentah itulah saya bisa

¹⁰² Dendy Sugiono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) h.340

¹⁰³ *Ibid*,

mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sejak awal penitipan bahan mentah, tidak ada perjanjian diantara saya dan pelanggan mengenai bahan mentah yang masih memiliki sisa akan menjadi milik saya atau tetap menjadi milik pelanggan. Mengenai upah, saya meminta bayaran sebesar Rp.50.000., setelah saya menyelesaikan pembuatan kue kering seberat 3 kg. Kue kering yang biasa saya buat seperti; nastar, kue kacang, kue mentega, *brownis* kering, putri salju, dan ring keju. Saya hanya menuruti permintaan pelanggan, kue kering apakah yang pelanggan inginkan, tetapi yang lebih banyak diminati adalah kue kering nastar.”¹⁰⁴

Dalam praktiknya, pembuatan kue lebaran untuk ukuran 1,5 kg kue nastar siap makan hanya dibutuhkan bahan mentah seperti 3 buah nanas, wisman 200gr, mentega 200gr, gula halus 100gr, kuning telur 4 butir, putih telur 2 butir, terigu 500gr, susu bubuk 100gr, maizena 50gr, keju 100gr. Akan tetapi owner pembuat kue lebaran meminta bahan mentah kepada pelanggan masing-masing 1 kg setiap macam bahannya, kecuali keju 1 kotak yang beratnya 175gr. Kue kering ini diproduksi secara masal atau dengan kata lain diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak setelah dilakukan pencampuran bahan lalu dioven dengan suhu yang sesuai agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk memenuhi permintaan para pelanggan.¹⁰⁵

Dari wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa permintaan bahan mentah tersebut seharusnya pelanggan mendapatkan 3 kg kue nastar, namun pada kenyataanya hanya mendapatkan 1 kg kue nastar. Dari sini *owner* pembuat kue lebaran sudah mendapat keuntungan 2 kg kue nastar, belum lagi ditambah bahan mentah sisa lainnya. Sisa bahan mentah tersebut masih bisa dibuat untuk kue lebaran jenis lainnya. Meskipun sisa bahan mentah itu tidak

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ajeng (*owner*) di *Holla Cake And Cokies*, tgl 21 Mei 2021

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ajeng (*owner*) di *Holla Cake And Cokies*, tgl 21 Mei 2021

memenuhi resep tapi *owner* hanya perlu menambahkan sedikit bahan agar bisa jadi kue lebaran yang siap dipasarkan.

Selain wawancara kepada *owner*, peneliti juga melakukan wawancara kepada para pelanggan untuk memberikan tanggapan terhadap sisa bahan mentah yang tidak dikembalikan oleh *owner Holla Cake And Cokies* yang terdapat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak 10 (sepuluh) orang pelanggan yang peneliti jumpai di masing-masing kediamannya. Berikut ini merupakan wawancara yang sudah didapatkan oleh peneliti mengenai tanggapan masyarakat terhadap sisa bahan mentah yang tidak dikembalikan oleh *owner Holla Cake And Cokies* sebagai berikut:

Ibu Apriyani adalah pelanggan pertama yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Alasan saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng karena saya kurang paham cara membuat kue kering untuk lebaran. Saya berminat karena kue kering yang Ibu Ajeng buat terlihat cantik dan rasanya enak, maka dari itu saya lebih memilih untuk menitipkan bahan mentah kepada ibu ajeng. Jika untuk bahan mentah yang masih tersisa saya kurang paham, saya berfikir jika bahan mentah itu sudah habis semua. *Owner* meminta bayaran sebesar Rp.50.000., setiap 3 kg kue kering yang beliau buat. Menurut saya lebih menguntungkan menitipkan bahan mentah, dan juga pada saat menitipkan bahan saya hanya perlu mengatakan “Ibu Ajeng, saya menitipkan bahan mentah ini untuk 3 kg kue nastar”. Pada saat menitipkan bahan mentah tidak ada perjanjian bahwa jika masih ada bahan mentah yang tersisa, bahan mentah itu tetap menjadi milik saya atau menjadi milik *owner*”.¹⁰⁶

Ibu Lia adalah pelanggan kedua yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Alasan saya menitipkan bahan mentah kepada ibu Ajeng karena saya sendiri tidak sempat membuatnya. Saya sibuk

¹⁰⁶ Wawancara dengan Apriyani (pelanggan) di Desa Serdang I , tgl 21 Mei 2021

merawat keluarga kecil saya, jadi sangat tidak memungkinkan untuk membuat kue kering itu sendiri. Saya berminat menitipkan bahan mentah karena kue kering yang Ibu Ajeng buat bisa dikatakan enak. Jika untuk bahan mentah yang masih memiliki sisa atau tidak, saya tidak mengetahuinya. Mungkin masih memiki sisa sedikit, untuk upah yang harus dibayarkan sebesar Rp.50.000. setaip 3 kg kue kering. Menurut saya pribadi lebih menguntungkan menitipkan bahan mentah, atau dengan kata lain menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng lebih murah dari pada langsung membeli kue kering yang sudah jadi. Pada saat menitipkan bahan mentah saya hanya mengatakan “Ibu, saya menitipkan bahan mentah ini untuk tiga macam kue kering yaitu; nastar, kue kacang, dan kue mentega”. Mengenai perjanjian, sejak awal tidak ada perjanjian jika bahan mentah masih memiliki sisa akan menjadi milik siapa.¹⁰⁷

Ibu Lusi adalah pelanggan ketiga yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Alasan saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng karena saya buruh pabrik yang selalu berkerja dari pagi sampai sore, jadi saya lebih memilih untuk menitipkan bahan mentah saja kepada ibu Ajeng. Saya berminat karena tidak memiliki waktu untuk membuatnya, untuk bahan mentah yang masih memiliki sisa saya minta dikembalikan. Karena jelas saya sudah membayar jasa yang dia berikan untuk membuat kue kering tersebut sebesar Rp. 50.000-. jadi bahan sisa itu milik saya. Menurut saya lebih murah menitipkan bahan mentah, pada saat menitipkan bahan mentah saya hanya mengatakan “Ibu saya menitipkan bahan mentah ini untuk 3 kg kue nastar”. Sejak awal tidak ada perjanjian seperti itu, bukankah sudah jelas bahan mentah itu milik saya? Kalau bahan mentah sisa tidak dikembalikan, untung yang didapat Ibu Ajeng berlipat ganda.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Lia (pelanggan) di Desa Serdang II, 21 Mei 2021

¹⁰⁸ Wawancara dengan Lusi (pelanggan) di Desa Serdang III A, tgl 21 Mei

Ibu Hana adalah pelanggan keempat yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Alasan dan minat saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng karena tahun-tahun sebelumnya saya sudah menitipkan bahan itu, dan hasilnya pun tetap sama rasanya tetap enak, tidak berubah. Jika untuk bahan mentah yang masih tersisa saya jelas paham, maka dari itu saya selalu membelanjakan bahan mentah dalam jumlah yang cukup, atau dengan kata lain tidak berlebih. Ibu Ajeng meminta upah sebesar Rp.50.000., dengan 3 kg kue kering yang saya minta seperti 2 kg kue nastar, dan 1 kg kue kacang. Sejak awal tidak ada perjanjian mengenai bahan mentah yang tersisa menjadi milik siapa, karena saya paham betul bahan mentah yang tersisa tidak akan dikembalikan, dan tidak mungkin saya sendiri akan bertanya mengenai bahan sisa. Saya juga menjaga perasaan ibu Ajeng, saya takut beliau akan tersinggung jika saya bertanya. Maka dari itu saya selalu menitipkan bahan mentah yang tidak berlebih”¹⁰⁹

Ibu Desi adalah pelanggan kelima yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya saya selalu membuat kue kering sendiri untuk Idul Fitri, alasan saya menitipkan bahan mentah karena ibu mertua saya sedang sakit dan saya harus merawatnya maka tahun ini adalah tahun pertama saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng. Saya menitipkan bahan mentah seperti tepung terigu, gula pasir, wisman, mentega, susu bubuk, maizena, dan telur masing-masing dari bahan tersebut berjumlah 1 kg. Saya menitipkan semua bahan itu yang sama sekali belum diolah kecuali selai nanas yang sudah saya buat sendiri di rumah, karna saya takut kalau selai yang dibuat Ibu Ajeng kurang manis. Sesuatu hal yang menarik minat saya untuk menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng karena banyaknya pelanggan yang sudah mempercayai beliau untuk membuat kue kering

¹⁰⁹ Wawancara dengan Hana (pelanggan) di Desa Serdang III B, tgl 21 Mei 2021

nastar. Mengenai bahan mentah yang penulis tanyakan tadi kepada saya, saya kurang memahami bahan tersebut memiliki sisa atau tidak. Karena setiap pembuat kue memiliki resep yang berbeda, dan jika bahan mentah tersebut masih memiliki sisa seharusnya Ibu Ajeng mengembalikannya kepada saya. Jika ditanya lebih untung menitipkan bahan atau membeli langsung kue kering yang sudah jadi, jelas lebih untung menitipkan bahan mentah. Alasannya karena membelanjakan bahan mentah untuk 3 kg kue nastar paling banyak menghabiskan uang sebesar Rp.150.000., dan memberikan upah kepada Ibu Ajeng sebesar Rp.50.000., jika ditambahkan habis Rp.200.000., sedangkan jika membeli kue nastar yang sudah jadi, setiap 1 kg harga yang ditawarkan sekitar Rp.100.000., sampai Rp.120.000., Jika ditambahkan mendapatkan hasil Rp.300.000., sampai Rp.360.000. tidak ada perjanjian antara saya dan Ibu Ajeng, jika masih ada bahan mentah yang tersisa akan tetap menjadi milik saya atau menjadi milik Ibu Ajeng¹¹⁰.

Ibu Susan adalah pelanggan keenam yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Tahun ini adalah tahun keempat saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng, awalnya saya mengetahui bahwa Ibu Ajeng menerima bahan mentah titipan kue lebaran ini melalui *Social Media Facebook*. Saya tertarik karena saya sibuk mengajar anak-anak sekolah *daring* (dalam jaringan), apalagi anak-anak yang saya didik masih dibangku Sekolah Dasar jadi masih harus benar benar diperhatikan. Jika untuk sisa bahan mentah yang tidak dikembalikan saya tidak tahu menahu karena dari tahun lalu pun yang saya terima hanya kue kering saja, tidak ada bahan mentah yang dikembalikan. Tetapi untuk saya sendiri, saya lebih bersyukur jika bahan mentah tersebut dikembalikan, karena saya sudah memberikan upah Kepada Ibu Ajeng sebesar Rp.50.000.,. Namun jika tidak dikembalikan yasudah, toh dikembalikan pun saya tidak tahu

¹¹⁰ Wawancara dengan Desi (pelanggan) di Desa Sidodadi , tgl 22 Mei 2021

sisanya bahan mentah itu akan digunakan untuk apa. Menurut saya lebih murah menitipkan bahan mentah daripada membeli kue yang sudah jadi. Pada saat menitipkan bahan mentah, saya hanya minta dibuatkan 3 macam kue kering seperti nastar, kue kacang, dan putri salju. Saat itu juga tidak ada perjanjian bahan mentah itu akan menjadi milik siapa”.¹¹¹

Ibu Siti adalah pelanggan ketujuh yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Sejak 3 tahun yang lalu, saya sudah menitipkan bahan mentah untuk dibuat kue lebaran ini kepada Ibu Ajeng. Alasannya karena saya tipe orang yang malas, saya lebih memilih untuk menitipkan bahan mentah karena menurut saya itu lebih praktis. Saya berminat karena kue kering yang Ibu Ajeng buat sangat cocok dengan selera saya. Selanjutnya untuk bahan mentah yang masih memiliki sisa atau tidak, saya benar-benar tidak tahu itu karena selama ini Ibu Ajeng tidak pernah memberi tahu saya bahwa masih ada bahan mentah yang tersisa atau tidak. Menurut saya lebih menuntungkan menitipkan bahan mentah, dan saya hanya perlu membayar upah sebesar Rp.50.000., setiap 3 kg kue kering yang sudah jadi kepada Ibu Ajeng. Pada saat menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng saya hanya mengatakan “Bu saya menitipkan bahan ini untuk 3 macam kue seperti, brownies kering, nastar dan ring keju”. Untuk perjanjian bahan mentah yang tersisa akan menjadi milik siapa, sejak awal itu tidak ada”.¹¹²

Ibu Pariem adalah pelanggan kedelapan yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Setiap tahun saya selalu menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng, kalau tidak salah tahun ini adalah tahun ketiga. Awal mula saya mengetahui bahwa Ibu Ajeng ini menerima titipan bahan mentah dari Ibu Susan yang merupakan tetangga saya, saat itu kue kering milik Ibu Susan sudah jadi, lalu saya mencicipi kue nastar tersebut. Alasan dan

¹¹¹ Wawancara dengan Susan (pelanggan) di Desa Jatibaru, tgl 22 Mei 2021

¹¹² Wawancara dengan Siti (pelanggan) di Desa Jatibaru, tgl 22 Mei 2021

minat saya karena rasa kue nastar nya sangat enak, dan cucu saya pun sangat suka. Maka dari itu setiap tahun nya saya selalu menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng. Selanjutnya tentang bahan mentah yang penulis tanyakan tadi, saya kurang mengetahuinya. Mohon dimaklumi, saya sudah tua dan tidak pintar sama sekali mengenai kue-kue kering. Saya hanya memenuhi permintaan bahan mentah dari Ibu Ajeng, saya sama sekali tidak mengetahui ukuran pembuatan kue tersebut karena dari tahun-tahun sebelum menitipkan bahan kepada ibu Ajeng, saya selalu membeli kue nastar dipasar. Tetapi, kalau bahan mentah tersebut masih memiliki sisa harusnya dikembalikan kepada saya. Ibu Ajeng meminta upah sebesar Rp.50.000., setiap 3 kg nastar yang saya minta. Sejak awal tidak ada perjanjian bahan mentah yang tersisa itu akan menjadi milik siapa, tetapi sepertinya itu tetap menjadi milik saya, karena saya sudah membayar upah Ibu Ajeng seperti yang beliau minta”.¹¹³

Ibu Yati adalah pelanggan kesembilan yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

“Sejak tiga tahun yang lalu saya selalu menitipkan bahan mentah untuk ~~dijadikan kue kering~~ kepada Ibu Ajeng. Alasannya karena saya sibuk berdagang dipasar, jadi tidak sempat untuk membuat kue kering sendiri dirumah. Saya berminat karena kue kering yang Ibu Ajeng buat cantik dan enak. Mengenai bahan mentah yang masih memiliki sisa, saya sudah bisa memperkirakannya. Tetapi Ibu Ajeng tidak pernah mengembalikannya kepada saya. Pada saat menitipkan bahan mentah saya mengatakan bahwa saya menginginkan 3 kg kue nastar, tidak ada perjanjian apapun mengenai bahan mentah yang masih memiliki sisa. Untuk upah yang dibayarkan sebesar Rp.50.000.,”.¹¹⁴

Ibu Ros adalah pelanggan terakhir atau pelanggan kesepuluh yang penulis wawancarai, beliau memberi tanggapan;

¹¹³ Wawancara dengan Pariem (pelanggan) di Desa Jatibaru, tgl 22 Mei 2021

¹¹⁴ Wawancara dengan Yati (pelanggan) di Desa Suban, tgl 23 Mei 2021

“Tahun ini adalah tahun pertama saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng, tahun-tahun sebelumnya saya membuat kue kering sendiri dirumah. Alasan saya menitipkan bahan mentah karena tahun ini saya sedang mengandung diusia kehamilan yang dikatakan sangat muda, maka dari itu saya menitipkan bahan mentah kepada Ibu Ajeng. Saya berminat karena kue kering yang dibuat Ibu Ajeng terlihat cantik, dan juga sudah banyak pelanggan yang menitipkan bahan, maka dari itulah saya yakin bahwa Ibu Ajeng bisa dipercaya untuk membuat kue kering yang enak. Mengenai bahan sisa yang penulis tanyakan, saya jelas mengetahui bahwa bahan mentah tersebut masih memiliki sisa karena saya sendiri pun setiap tahun nya selalu membuat kue kering sendiri. Saya akan lihat terlebih dahulu, bahan mentah yang tersisa masih banyak atau tidak. Jika bahan mentah tersebut masih banyak, maka saya akan meminta Ibu Ajeng untuk mengembalikannya. Jika bahan mentah tersebut tersisa sedikit saya akan mengikhlasakannya. Mengenai upah yang harus dibayarkan kepada Ibu Ajeng sebesar Rp.50.000., pertiga kilogram kue kering yang saya minta. Untuk perjanjian mengenai bahan sisa itu sejak awal tidak ada, akan tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika bahan mentah masih tersisa banyak, saya akan meminta Ibu Ajeng untuk mengembalikannya. Namun, jika hanya tersisa sedikit saya akan mengikhlasakannya”¹¹⁵.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ros (pelanggan) di Desa Suban, 23 Mei 2021



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Semakin banyaknya kemajuan dikehidupan manusia, semakin banyak pula kesibukan, pekerjaan, dan keinginan manusia. Salah satunya adalah sesuatu yang serba instan dan praktis. Karena sangat banyaknya keinginan orang-orang untuk hidup dengan praktis, banyak pula ide-ide yang muncul dari beberapa orang untuk membuka usaha, entah itu mencuci pakaian atau *laundry*, pembuat keripik, pembuat kerupuk, dan pembuat kue-kue kering untuk lebaran. *Owner* pembuat kue lebaran *Holla Cake And Cokies* adalah salah satunya. *Owner Holla Cake And Cokies* membuka usaha *home made* ini dari beberapa tahun yang lalu, ia melihat celah dari sekian banyak orang yang beliau kenal, rata-rata adalah tipe orang yang ingin hidup serba praktis. Baju-baju mereka *laundry*, pekerjaan rumah mereka memilih untuk menyewa asisten rumah tangga, bahkan makan sekalipun mereka memilih untuk membeli dari pada memasak sendiri. Pelaksanaan praktik penitipan bahan mentah kue lebaran ini biasa dilakukan pada pertengahan bulan Ramadhan. Para pelanggan dari berbagai Desa yang berada disekitar Tanjung Bintang mengantarkan secara langsung bahan mentah ini kepada *owner*.

Pada praktiknya, saat pelanggan mengantarkan bahan mentah kepada *owner* pembuat kue kering, ia hanya mengatakan perjanjian secara lisan seperti; “Saya titipkan bahan mentah ini Kepada Ibu untuk 3 kg kua nastar”, begitu pula *owner* pembuat kue kering yang menjawabnya secara lisan “Saya terima bahan mentah ini dan akan Saya selesikan 5 hari sebelum Hari Raya Idhul Fitri, dengan upah sebesar Rp.50.000.,”. Dimata hukum, akad atau perjanjian secara lisan ini sudah dipastikan sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; sepakatnya kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian, kedua belah pihak sudah cakap untuk membuat suatu perjanjian, terdapat

suatu hal tertentu di dalam kontrak, terdapat suatu sebab yang halal atau tidak melanggar hukum. Namun pada dasarnya akad lisan ini memiliki kelemahan, dimana salah satu pihak dapat memungkiri perjanjian yang sebelumnya telah disepakati karena tidak adanya bukti tertulis, meskipun perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Karena tidak adanya bukti tertulis, dan kejelasan pada perjanjian tentang bahan mentah itulah yang menyebabkan *owner* pembuat kue kering tidak mengembalikan bahan mentah yang tersisa milik pelanggan. *Owner* menganggap bahwa bahan mentah yang tersisa itu adalah miliknya, rata-rata dari pelanggan tidak mengetahui bahwa bahan mentah yang mereka titipkan melebihi jumlah yang seharusnya, dan mereka juga tidak mengetahui bahwa sisa bahan mentah itu tidak dikembalikan oleh *owner* pembuat kue kering. Sesuai dengan yang dikatakan oleh *owner* pembuat kue kering pada saat peneliti wawancara, bahwa *owner* tidak pernah mengatakan pada pelanggan jika bahan mentah yang mereka titipkan lebih dari cukup. Meskipun sudah dengan jelas bahwa pelanggan membayarkan upah sebesar Rp.50.000., yang diminta oleh *owner* saat ia menyelesaikan 3 kg kue kering. Jadi seharusnya bahan mentah itu akan tetap menjadi milik pelanggan selama pelanggan tidak memberikannya kepada *owner*.

Dari pemaparan di atas, maka dapat penulis kemukakan analisis data bahwa praktik penitipan bahan mentah kue lebaran yang dilakukan oleh *owner* pembuat kue kering seharusnya menggunakan sistem yaitu pelanggan menitipkan bahan mentah yang dibutuhkan untuk kue kering yang diinginkan, *owner* menyelesaikan pembuatan kue kering yang diinginkan pelanggan, pelanggan membayarkan upah sebesar Rp.50.000., seperti yang *owner* minta setiap kali *owner* menyelesaikan 3 kg kue kering, dan yang terakhir *owner* dengan jujur mengatakan dan mengembalikan bahan mentah yang tersisa kepada pelanggan tanpa dikurangi sedikitpun. Namun pada praktiknya *owner* tidak mengatakan dengan jujur dan tidak mengembalikan bahan mentah yang tersisa kepada pelanggan, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa *owner* dengan sengaja tidak mengatakan dan

tidak mengembalikan bahan mentah yang masih bersisa kepada para pelanggan hanya untuk memperoleh keuntungan berlipat semata, karena para pelanggan tidak mengetahui bahwa bahan mentah yang mereka titipkan masih memiliki sisa atau dengan kata lain lebih dari cukup. Hal ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, karena menyangkut keikhlasan dari pelanggan. Jika pelanggan ikhlas memberikan bahan mentah yang tersisa, maka itu akan halal dimanfaatkan untuk *owner*. namun jika pelanggan tidak ikhlas, hal itu akan haram baginya (*owner*).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Dalam Islam seluruh kehidupan manusia telah diatur secara menyeluruh dan mendalam, seperti jual beli, zakat, sewa menyewa (upah), dan *wadi'ah* (penitipan). Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan *wadi'ah* merupakan meninggalkan sesuatu sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada *mudi' atau muwaddi* (orang yang menitipkan) kapan saja orang yang menitipkan menghendakinya. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda mendefinisikan, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak. Namun yang menjadi permasalahan masih ada yang belum memahami sepenuhnya tentang barang titipan (*wadi'ah*), sehingga masih ada penyimpangan tentang penitipan ini dikalangan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan merugikan sebagian orang.

Dalam melakukan perjanjian penitipan barang atau *wadi'ah* harus memenuhi rukun, syarat-syarat, *sighat*, dan jenis-jenis dari *wadi'ah*. Dalam hal ini rukun *wadi'ah* ada 4 yaitu Barang yang dititipkan (*wadi'ah*), Orang yang menitipkan (*mudi' atau muwaddi*'), Orang yang menerima titipan (*muda' atau*

mustawda'), Ijab qabul (*sighat*). Sedangkan syarat-syarat *al-wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang sudah di sebutkan di atas, syarat benda yang dititipkan harus benda yang memiliki nilai meskipun dianggap sebagai *mal* atau najis, syarat orang yang menitipkan (*mudi' atau muwaddi'*) dan orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*) diisyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun dia belum baligh, Syarat *sighat* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*), demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan). *Wadi'ah* dapat di bedakan menjadi dua, yaitu *Wadi'ah Yad al – Amanah* dan *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*. Dalam *Wadi'ah Yad al – Amanah* penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan untuk kepentingan pribadi sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, namun penerima titipan dapat meminta biaya pemeliharaan barang karena sudah menjaga barang dari kerusakan. Dan dalam *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* penerima titipan diizinkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut.

Pada saat melakukan ijab dan qabul atau *sighat*, pelanggan sudah mengatakan ucapan ijab dengan tegas (*sharih*) Kepada *owner* “Saya titipkan bahan mentah ini Kepada Ibu untuk 3 kg kua nastar”, Demikian pula qabul yang diucapkan oleh *owner* dihadapan pelanggan dengan lafal yang tegas (*sharih*) seperti: “Saya terima bahan mentah ini dan akan Saya selesikan 5 hari sebelum Hari Raya Idhul Fitri, dengan upah sebesar Rp.50.000.,”. Dalam hal ini ijab dan qabul yang dilakukan oleh pelanggan dan *owner* sudah bisa dikatakan memenuhi syarat, namun karena kurangnya kejelasan atau ucapan dari pelanggan yang tidak menegaskan bahwa bahan mentah yang masih memiliki sisa nanti akan menjadi milik siapa, hal itu dimanfaatkan oleh *owner* untuk mengambil keuntungan berlipat dengan cara tidak berkata jujur dan tidak mengembalikan bahan mentah yang masih memiliki sisa kepada pelanggan. Seharusnya *owner* lebih memperhatikan lagi, karena akad atau *sighat* yang

telah dilakukannya adalah akad yang *shahih* dan *sharih* (tegas). Akad *Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah “berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad”.¹¹⁶

Seperti Firman Allah SWT yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. QS. Al-Maa’idah (5) ayat (1).¹¹⁷

Akibat dari perbuatan *owner* ini menjadikan *sighat* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak termasuk kedalam *Wadi’ah Yad al – Amanah* maupun *Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah*, karena *owner* meminta upah sebesar Rp.50.000., dan memanfaatkan barang yang dititipkan pelanggan padanya. Pada perjanjian tersebut, *owner* juga meminta upah kepada pelanggan sebesar Rp.50.000., dalam hal ini menurut penulis ada penyimpangan, karena *owner* ingin memanfaatkan barang yang dititipkan dan juga mendapat upah dari pelanggan. Sehingga *owner* bisa mendapatkan keuntungan berlipat tanpa diketahui oleh pelanggan, dan pada akhirnya karena perbuatan *owner* ini menimbulkan keresahan dan kerugian bagi para pelanggan (*kemudharatan*). Tentunya tidak sesuai dengan akad *Wadi’ah*,

¹¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 1982), h.55.

¹¹⁷ Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76.

dan lebih tepat jika disebut akad *ijarah* karena menetapkan upah. Islam sudah mengajarkan bahwa dilarang mengambil harta sesama dengan cara yang bathil. Dalam hal ini jelas bahwa bahan mentah yang tidak dikembalikan oleh *owner* adalah haram karena tidak diketahui bahwa pelanggan ikhlas atau tidak.

Seperti Firman Allah SWT yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4): 29)¹¹⁸

Mengenai perubahan bentuk barang yang dititipkan, menurut penulis tidak ada masalah. Karena syarat benda yang dititipkan harus memiliki nilai (*qimah*), bisa dimanfaatkan, dan dipandang sebagai *mal* walaupun najis. Dalam hal ini bahan mentah kue lebaran yang dititipkan seperti tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, mentega, wisman, telur, dan lain sebagainya memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Karena jika bahan mentah itu sudah diolah dan menjadi kue kering yang siap dikonsumsi, kue kering itu bermanfaat dan bisa dimakan oleh seseorang, juga bisa diperjualbelikan agar penjual mendapatkan keuntungan. Jadi perubahan bentuk barang titipan dalam konteks bahan mentah kue lebaran tidak menjadi masalah.

¹¹⁸ *Ibid*,

Sistem yang dilakukan oleh *owner* pembuat kue kering ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, karena telah menimbulkan *kemudharatan* bagi para pelanggan. *Owner* pembuat kue kering menyembunyikan fakta bahwa bahan mentah yang dititipi oleh pelanggan masih memiliki sisa, bahan mentah yang masih memiliki sisa tersebut seharusnya tetap menjadi milik pelanggan, dan *owner* dilarang keras untuk memanfaatkan bahan mentah itu untuk kepentingan pribadi. Kecuali, apabila pelanggan mengatakan dengan ikhlas, dan memberikan bahan mentah yang masih tersisa itu kepada *owner*. Dengan hal ini jelas bahwa *owner* pembuat kue kering tidak jujur, berdusta, menipu, dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini jelas dikatakan bahwa bahan mentah tersisa yang diambil oleh *owner* adalah haram jika pelanggan tidak mengikhlaskannya.

Kejujuran adalah sifat penting bagi pelaku bisnis yang diridhai oleh Allah SWT, selain mendapatkan keuntungan, kejujuran juga bisa mendatangkan keberkahan. Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿١١٩﴾

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿١٢٠﴾

Artinya; “Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.” (QS. An-Nisa (4): 69-70).¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid*,

Maka dari itu Islam telah mengajarkan agar menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang telah diajarkan, seperti menerapkan kejujuran, memenuhi rukun dan syarat dari akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar mendapatkan keuntungan, keberkahan, dan kelanggengan dalam menjalankan bisnis. Karena berbisnis adalah suatu ibadah apabila dilakukan dengan mengingat, mentaati Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melihat bahwa yang terjadi dalam Praktik Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ini menyertakan sistem upah atau imbalan yang diberikan oleh penitip (pelanggan) kepada *owner* pembuat kue kering sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad penitipan bahan mentah kue lebaran ini sebenarnya menurut hukum Islam adalah akad *ijarah* meskipun rukun dan syarat *wadi'ah* terpenuhi, karena penitipan *wadi'ah* ini hanya terfokus kepada suatu bahan mentah yang dititipkan dan dipasrahkan (dijamin) kepada *owner* untuk dibuatkan kue kering. Sehingga praktik ini merupakan praktik *ijarah*, karena praktik ini menggunakan jasa dari seorang *owner* pembuat kue kering yang menerima bahan mentah yang dititipkan dengan disertai imbalan yang sudah ditentukan oleh *owner* pembuat kue kering. Dikarenakan kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang *ijarah* dan *wadi'ah* di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, menyebabkan banyak terjadinya kesalahpahaman dalam praktik penitipan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang dilakukan oleh *owner* pembuat kue kering dan pelanggannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penitipan bahan mentah kue lebaran yang dilakukan oleh *owner* pembuat kue kering di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan cara *owner* mempromosikan kue kering yang ia buat melalui *social media facebook*, *owner* menggunakan sistem yang dianggap lebih menarik oleh pelanggan, yaitu *owner* bersedia menerima bahan mentah dan hanya meminta upah sebesar Rp.50.000., setiap kali menyelesaikan 3 kg kue kering. Dalam hal ini sistem yang dibuat *owner* dinilai lebih murah oleh pelanggan, namun pada kenyataannya *owner* pembuat kue kering mengambil keuntungan berlipat dengan cara tidak mengembalikan sisa bahan mentah kepada para pelanggan. *Owner* memanfaatkan perjanjian yang tidak begitu jelas tentang sisa bahan mentah demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini *owner* tidak diperbolehkan untuk melanjutkan cara yang dilakukannya selama ini, karena sama saja *owner* tidak jujur, membohongi, mengkhianati, dan menipu para pelanggan yang sudah mempercayainya.
2. Menurut pandangan hukum Islam, penitipan bahan mentah ini menyertakan sistem upah atau imbalan yang diberikan oleh penitip (pelanggan) kepada *owner* pembuat kue kering sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad penitipan bahan mentah kue lebaran ini sebenarnya menurut hukum Islam adalah akad *ijarah* meskipun rukun dan syarat *wadi'ah* terpenuhi, karena penitipan *wadi'ah* ini hanya terfokus kepada suatu bahan mentah yang dititipkan dan dipasrahkan (diamanahkan) kepada *owner* untuk dibuatkan kue kering. Sehingga praktik ini merupakan praktik *ijarah*, karena praktik ini menggunakan jasa dari seorang *owner* pembuat kue kering yang menerima bahan mentah yang dititipkan dengan disertai imbalan yang sudah ditentukan oleh *owner* pembuat kue kering. Dikarenakan kurangnya wawasan

dan pengetahuan masyarakat tentang *ijarah* dan *wadi'ah* menyebabkan banyak kesalahpahaman dalam praktiknya.

Sisa bahan mentah yang tidak dikembalikan oleh *owner* tanpa sepengetahuan pelanggan ini haram hukumnya, kecuali jika pelanggan mengikhlasakannya. Karena Islam telah mengajarkan bahwa dilarang untuk mengambil harta sesama (saudara) dengan cara yang bathil, atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Baik itu dengan cara menipu, mengkhianati, dan berdusta kepada seseorang ataupun lembaga. Juga *owner* tidak menerapkan prinsip kejujuran dan tidak memperhatikan maksud dari akad yang telah dilakukan dalam berbisnis seperti yang telah diajarkan oleh Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue lebaran, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut;

1. Penulis harapkan bahwa seharusnya lebih diperhatikan lagi rukun, syarat, dan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti berapa upah yang dibayarkan, sisa bahan mentah yang akhirnya akan tetap menjadi milik pelanggan atau diberikan kepada *owner* pembuat kue lebaran. Serta diharapkan untuk *owner* pembuat kue lebaran untuk lebih jujur dalam berbisnis, agar tidak ada lagi pihak yang kecewa, dan bisnisnya bisa lancar dan langgeng.
2. Baik *owner*, pelanggan, dan masyarakat disekitar Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang diharapkan untuk lebih memahami teori tentang akad *ijarah* dan *wadi'ah* (penitipan). Agar tidak ada lagi praktik yang merugikan salah satu pihak seperti yang dilakukan oleh *owner* pembuat kue lebaran ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2004.
- Ahmad Adha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan". (Skripsi Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers, 1982).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Hamzah, 2010.
- Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6, Beirut: al-Kutub al-ilmiah, t.t.), Pasal.776.
- Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6, Beirut: al-Kutub al-ilmiah, t.t.
- Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Amelia Nurnalasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Hewan Kurban". (Skripsi Prigram Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga Jawa Tengah, 2021).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dendy Sugiono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Ibnu Abidin, Hadyiyah Radd Al-Mukhtar. Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, Dar Al-Fikr, Beirut, 1992.

- Ikhfa Aelulu Anisatul Ummah, *“Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Persertif Hukum Islam”* (Skripsi Program Strata 1 IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).
- Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Lely Elvirawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak di tempat Penitipan Anak Balita Shandy Putra Surabaya” . (Skripsi Program Strata 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 1995).
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Pers, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t., 199
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet, IV, 1960.
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta: GaneshaPress, 2000.
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nicole William dan Budi Djatmiko, “Kamus Saku Bahasa Inggris” *Kamus Inggris – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Interprise, 2011.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Wasilatur Rohmaniyah, *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Jurnal

Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No.2, Desember 2016.

Silfia, “*Pengaruh Substitusi Tepung Pisang Terhadap Mutu Kue Kering*” *Jurnal Litbang Industri*, Vol.2 No.1, 2012.

Wahbah Az-Zuhaily, *op.cit.*, 2019.

Wawancara

Ajeng Budi, Wawancara dengan *owner* pembuat kue kering, di *Holla Cake And Cookies*, Desa Serdang I, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 21 Mei 2021.

Apriyani, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Serdang I, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 21 Mei 2021.

Desi Handayani, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Sidodadi, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 22 Mei 2021.

Hanawati, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Serdang III B, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 21 Mei 2021.

Ida Rosmawati, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Suban, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 23 Mei 2021.

Lia Astuti, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Serdang II, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 21 Mei 2021.

Lusi, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Serdang III A, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 21 Mei 2021.

Pariem, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 22 Mei 2021.

Siti Muntamah, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 22 Mei 2021.

Susan Maryadi, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 22 Mei 2021.

Suyati, Wawancara dengan pelanggan kue kering, di Desa Suban, Kecamatan. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”, 23 Mei 2021.

